



Buletin Parlementaria

Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022



DPR Setujui RUU Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua



**3 Puan Maharani:
Sosialisasi Pembelian
Minyak Goreng dengan
Aplikasi Harus Gencar**



**4 Sufmi Dasco Dorong
Komisi III Percepat
Pembahasan Revisi
UU Narkotika**



9 772614 339005

DPR Setujui RUU Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima naskah RUU Pembentukan Tiga Provinsi Papua dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Gerald/nvl

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan. Persetujuan ini diambil usai Rapat Paripurna DPR RI mendengar laporan dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Usai laporan Komisi II DPR RI tersebut diterima Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna pun meminta persetujuan dari seluruh Anggota DPR RI.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Dasco di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis

(30/6), yang disusul jawaban ‘setuju’ dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI saat itu.

Dalam laporannya, Doli mengatakan tujuan pemekaran Papua adalah untuk percepatan pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua. Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspirasi masyarakat Papua. Doli berharap kebijakan otsus bagi Provinsi Papua itu tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, tapi juga bisa mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan

legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

“UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan usai Rapat Paripurna.

Puan memastikan, DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya terkait syarat maksimal usia aparatur sipil negara (ASN) orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer. “Lewat ketiga UU ini, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua,” tutur Puan. ■ ayu,sf/aha



Puan Maharani: Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng dengan Aplikasi Harus Gencar

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi secara masif. Apalagi, pembeli minyak goreng curah di pasar maupun warung kebanyakan adalah kalangan yang sehari-harinya tidak

terbiasa menggunakan aplikasi atau teknologi informasi.

Sosialisasi pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000/liter atau Rp15.500/kilogram dimulai Senin ini hingga 2 pekan ke depan. Puan menilai, sosialisasi harus dilakukan serentak hingga pelosok daerah Tanah Air. “Dan perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi,” kata Puan dalam keterangan pers kepada **Parlementaria**, Senin (27/6).

Puan memahami, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dimaksudkan agar pemerintah dapat mengecek distribusi minyak goreng secara real time sebagai antisipasi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan. “Harus ada pendekatan langsung ke masyarakat, ke pedagang, agar mereka benar-benar memahami transisi sistem pembelian minyak goreng,” ucapnya..

Di sisi lain, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara seksama. Sebab, kata Puan, bukan tidak mungkin pembelian dengan metode ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan. ■ sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimban, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysle, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afrdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Christa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Sufmi Dasco Dorong Komisi III Percepat Pembahasan Revisi UU Narkotika

usai audiensi, di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu memastikan RDP tersebut akan dikoordinasikan oleh Komisi III dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, ia pun mengakui jika langkah untuk melegalisasi ganja akan menuai pro dan kontra. “Namun yang namanya aspirasi, kan semua harus kita akomodir baik pihak pro maupun kontra,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Santi Warastuti mengaku bersyukur telah diterima aspirasinya oleh Pimpinan DPR. Ia memohon dukungan, baik bagi anaknya maupun anak-anak lainnya, yang sama-sama mengidap penyakit CP. “Ganja ini terutama untuk mengatasi kejangnya. Karena setiap anak CP itu hampir semuanya disertai kejang. Setiap kejang terjadi pasti mengalami kemunduran kondisi klinis. “Dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju (sembuh) sedikit saja susah



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima aspirasi dari Santi Warastuti, ibu dari Fika yang mengalami penyakit Cerebral Palsy (CP). Foto: Yoga/nvl

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari Santi Warastuti, ibu dari Fika yang mengalami penyakit Cerebral Palsy (CP) yang beberapa lalu viral di sosial media saat *Car Free Day* (CFD) di Jakarta, karena membutuhkan ganja untuk kebutuhan medis. Kedatangan ibu tersebut ditemani oleh Singgih, seorang pengacara yang melakukan *Judicial Review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ganja untuk kebutuhan medis diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasca menerima aspirasi tersebut, Dasco menegaskan pihaknya akan

mendorong adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III yang saat ini sedang membahas Revisi UU Narkotika. Salah satunya adalah mendorong adanya legalisasi ganja hanya untuk kebutuhan medis. “Kalau kita sempat minggu ini atau kalau tidak sebelum masuk masa reses untuk RDP,” ujar Dasco kepada awak media

”

YANG NAMANYA ASPIRASI, KAN SEMUA HARUS KITA AKOMODIR BAIK PIHAK PRO MAUPUN KONTRA

sekali karena disertai kejang,” ujarnya seraya menahan isak tangis.

Selain itu, Singgih menjelaskan sejauh ini upaya untuk JR ke MK atas UU tersebut belum diketahui. Oleh karena pembahasannya baru dibahas di internal dewan komisi hakim, lalu setelah itu akan dikeluarkan *legal opinion*. Setelah para hakim MK tersebut sepakat baru disusun draf keputusan, dan para pihak pemohon JR baru diundang untuk pembacaan hasil putusan. “Jadi masih lama. Karena hukum acara MK tidak mengatur kapan tiap perkara maksimal diputus. Jadi kita masih menunggu,” ujarnya yang mengaku telah menunggu dua tahun putusan MK sejak gugatan dilayangkan pada November 2020. ■ rdn/sf



Tangkis Pandemi, Indonesia–Korsel Dukung Kerja Sama Percepatan Pemanfaatan Teknologi Terbaru

“Kita ingin mendorong kedua negara untuk mempercepat kerja sama di bidang teknologi, terutama teknologi kesehatan di mana kita harus mengejar kekurangan teknologi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan kesehatan baik yang bersifat pengobatan maupun alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani berbagai penyakit, di antaranya pandemi maupun virus lainnya,” tutur Gus Muhaimin, kepada **Parlementaria**.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Member of Special Committee on Budget and Accounts Kang Deukgu, Member of Science, ICT, Broadcasting and Communication Committee Yang Jungsuk, dan Member of Health and Welfare Committee Choi Yونسuk,



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berfoto bersama Komite dan Kesejahteraan Majelis Nasional Korea Selatan. Foto: Runi/nvi

Demi mengejar perkembangan teknologi yang kini kian dinamis, Pimpinan DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar pertemuan dengan Ketua Komite dan Kesejahteraan Majelis Nasional Korea Selatan. Pertemuan ini dinilai menjadi babak baru bagi Indonesia dan Korea Selatan untuk menjalin kerja sama terkait percepatan pemanfaatan teknologi terbaru di

berbagai sektor, terutama di bidang kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar usai memimpin pertemuan tersebut di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6). Bagi Gus Muhaimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, kerja sama teknologi antar kedua negara ini juga akan memudahkan penanganan berbagai penyakit.

Gus Muhaimin menjelaskan urgensi percepatan pengembangan teknologi kesehatan di Indonesia.

Tanpa teknologi, Indonesia akan sulit menghadapi tantangan sejumlah potensi penyakit yang menyebar di dunia. “Indonesia harus mengakui kita membutuhkan teknologi yang murah, teknologi yang cepat, yang bisa segera digunakan. Dan Korea Selatan salah satunya yang cepat memproduksi teknologi,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. ■ ts/sf

RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR



Perwakilan sembilan fraksi di DPR RI saat menyerahkan pandangan fraksi terkait RUU KIA kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Gerald/mvl

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan RUU ini bertujuan agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa bertumbuh kembang secara baik. Pengesahan RUU KIA sebagai inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, usai sembilan fraksi di DPR telah menyampaikan pendapatnya terkait RUU KIA.

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah terobosan DPR dengan harapan agar RUU ini nanti menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan generasi penerus bangsa

memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi SDM unggul,” kata Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6). Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra).

Puan menambahkan, RUU KIA sangat berhubungan dengan pencegahan stunting yang masih menjadi problem di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan stunting itu adalah lewat inisiasi cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan.

“Lewat cuti melahirkan yang cukup, para ibu diharapkan secara maksimal bisa memberikan ASI kepada para bayinya yang merupakan

langkah awal pemberian gizi untuk pencegahan stunting,” ucapnya.

RUU KIA juga mengusulkan adanya cuti ayah selama 40 hari bagi pekerja laki-laki yang istrinya baru melahirkan. Sebab RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk atas dukungan dari keluarganya sendiri. “Lewat RUU ini kita akan memberikan peran yang leluasa kepada suami untuk bersama-sama bertanggung jawab atas tumbuh kembang di masa awal lewat pemberian cuti yang cukup kepada para suami ketika istrinya melahirkan,” jelas Puan, usai Rapat Paripurna. ■ sf

DPR Resmi Sahkan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA

dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan dan moral calon hakim agung merupakan prasyarat penting untuk menjadi hakim agung pada MA. Atas dasar kriteria itu, Komisi III dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat serta berdasarkan pendapat dan pandangan dari 9 Fraksi Komisi III DPR RI menyetujui sebanyak



Pimpinan DPR RI berfoto bersama Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) terpilih periode tahun 2021-2022. Foto: Jaka/nvl

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan nama-nama Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) terpilih periode tahun 2021-2022 sebagaimana hasil laporan dan pembahasan di Komisi III DPR RI. Adapun nama-nama terpilih calon hakim tersebut yaitu Calon Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati, dan Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Cerah Bangun, serta Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor Agustinus Purnomo Hadi, dan Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor Arizon Mega Jaya.

Hasil laporan disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI di



KOMISI III MENYADARI DAN MEMAHAMI BAHWA KECAKAPAN, KEMAMPUAN, INTEGRITAS, WAWASAN KEBANGSAAN DAN MORAL CALON HAKIM AGUNG MERUPAKAN PRASYARAT PENTING UNTUK MENJADI HAKIM AGUNG PADA MA

Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6). “Komisi III menyadari

2 calon hakim agung dan 2 calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA tahun 2022,” ujar Adies.

Usai membacakan laporan, Adies selanjutnya menyerahkan dokumen hasil laporan 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA tahun 2022 terpilih itu kepada segenap Pimpinan DPR RI. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada peserta Rapat Paripurna DPR RI, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA tahun 2021-2022 dapat disetujui? yang lantas dijawab “setuju” secara serempak oleh segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI yang hadir. ■ pun/aha

Komisi I Puji Diplomasi Perdamaian Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon memuji upaya Presiden Joko Widodo terkait diplomasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina dengan harapan memengaruhi sikap kedua negara yang berperang. Effendi menilai Presiden Jokowi melakukan tahapan diplomasi yang mendasar dengan berupaya mengajak kedua negara untuk berdamai sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat dunia atas nama negara-negara berkembang dan posisinya sebagai Presidensi G20.

“Mudah-mudahan ini berdampak pada perubahan sikap kedua negara tersebut,” ujar Effendi Simbolon dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Misi Damai Jokowi di

Rusia-Ukraina, Efektifkah?’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6). Turut hadir pengamat pertahanan militer Connie Rahakundini Bakrie sebagai pembicara.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengaku belum melihat apakah tahapan tersebut akan ada tindak lanjut ke tahapan diplomasi berikutnya, seperti menawarkan Indonesia sebagai mediator atau tempat di Indonesia untuk melaksanakan perundingan antara Rusia dan Ukraina atau negara-negara G7 yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. DPR RI akan menunggu penjelasan terkait dengan hasil dari diplomasi Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia mengingat tahapan-tahapan diplomasi ada protokolnya.

Sementara, pengamat pertahanan militer Connie Rahakundini Bakrie turut mengapresiasi upaya diplomasi Presiden Jokowi beserta jajarannya ke Ukraina dan Rusia. Diplomasi Presiden Jokowi, menurut Connie, penting karena tidak ada negara-negara G7 yang bertindak sebagai pihak yang menyelesaikan masalah atau berupaya mengurangi dampak masalah perang Rusia-Ukraina.

Mereka justru menambah masalah melalui sanksi-sanksi terhadap Rusia atau mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. “Saya pikir posisi Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Asia yang datang pertama ke medan perang Rusia dan Ukraina, kemudian bisa berbicara dengan kedua negara yang berperang merupakan langkah yang baik,” kata Connie. ■ tn/sf



Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Foto: Kresno/nvl

Komisi IV Minta Aliran-Aliran Penyebaran Virus PMK Harus Dibendung

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno meminta agar pemerintah membendung aliran-aliran yang dapat menyebarkan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ia menyatakan, faktanya Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan pada tahun 2021 memang ditemukan virus PMK di daging kerbau dari India. Menurutnya kondisi ini tidak aman, mengingat virus PMK itu pasti masih ada, walaupun Bulog sudah melakukan kunjungan langsung ke India. “Semua dalam konteks bisnis pasti

akan mempertahankan agar barang dagangannya masih bisa dijual. Oleh karena itu saya mengusulkan agar aliran-aliran yang mungkin bisa menyebarkan virus ini harus dibendung daripada ini nanti ditangani, aliran tidak ditangani, gali lobang tutup lobang,” ujar Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat

Komisi IV DPR

RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirut Bulog, PIHC dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Kemudian terkait usulan

”

FAKTA NYA DIRJEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENYAMPAIKAN PADA TAHUN 2021 MEMANG DITEMUKAN VIRUS PMK DI DAGING KERBAU DARI INDIA.

anggaran untuk penanggulangan PMK sebesar Rp4,6 triliun, Sutrisno meminta Kementerian Pertanian perlu meyakinkan Kementerian Keuangan. Hal ini perlu segera dilakukan agar permasalahan mengenai PMK segera dapat teratasi. “Cepat lambatnya Rp4,6 triliun itu bagaimana Kementerian Pertanian meyakinkan kepada yang punya uang untuk memutuskan. Kalau berlambat-lambat ya akan lambat juga,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Sutrisno juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian agar berkoordinasi dengan daerah. “Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan aturan, memerintahkan kepada daerah, gunakan belanja tak terduga untuk menangani permasalahan PMK ini. Manakala tidak dijalankan ya uangnya mengalir, tapi juga masalahnya tidak terselesaikan,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) wilayah Jawa Barat IX itu. ■ gal/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno.
Foto: Arief/nvl

Materi Siaran LPP Harus Penuhi Kebutuhan Publik



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: Devi/mv

siaran yang sehat dan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Materi siaran LPP harus memenuhi kebutuhan publik akan penyiaran publik. Era digital tentu saja membawa dampak pada perubahan etos kerja, proses produksi, pilihan media penyebaran informasi serta hiburan. Hal ini didasari oleh realitas pemenuhan kebutuhan konten siaran bagi masyarakat di era penyiaran digital yang semakin spesifik namun bervariasi dalam metode penerimaan kontennya,” tandas Utut di Yogyakarta, Sabtu (25/6).

Politisi PDI-Perjuangan itu menyatakan, kanal digital tersedia dalam jumlah banyak dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Akan tetapi ada hal penting lainnya yaitu bagaimana LPP mampu untuk memenuhi konten siaran guna mengisi kanal digital dimaksud, sehingga frekuensi yang tersedia tidak mubazir. “LPP perlu beradaptasi untuk memproduksi konten siaran yang bervariasi dan menyajikannya pada semua jenis layanan penyiaran, termasuk juga melalui *platform* digital penyiaran,” tandas Utut. ■ dep/aha

Tim kunjungan kerja spesifik Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun RRI Yogyakarta, Dewan Pengawas LPP RRI, Direksi LPP RRI, Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, Ketua KPID Yogyakarta, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Dewan Pengawas LPP RRI, serta pihak terkait lainnya.

Utut menyampaikan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI memiliki peranan tersendiri dalam melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia. Sebagai LPP, tambahnya, kedua institusi tersebut tentu saja memiliki misi serta visi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konten

Komisi I Pantau Isu-Isu Strategis Nasional di Surakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen Daerah (BINDA) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) beserta jajaran. Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto memimpin rapat dengan membahas sejumlah isu strategis nasional dalam

perspektif intelijen negara.

“Kami selesai rapat dengan Binda Jateng membahas isu-isu lokal yang terjadi di Jateng khususnya, juga salah satunya terkait monitoring, pemetaan, dan pendalaman atas deteksi dan cegah dini terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jateng. Apalagi kita akan menghadapi Idul Adha, jadi Komisi I ingin mengecek bagaimana

Komisi I Apresiasi Konten Siaran TVRI Jateng

Tim Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Penyiaran Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menggelar pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Jawa dan Dewan Pengawas TVRI dalam rangka untuk mendapatkan



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono.
Foto: Novel/nvl

data, masukan, serta informasi terkait dengan perumusan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. RUU Penyiaran saat ini telah masuk dalam daftar Prolegnas, sebagai RUU Prioritas Tahun 2022 dan menjadi usul inisiatif Komisi I DPR RI.

“Panja Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dengan tujuan mendapatkan data, informasi, dan masukan terkait RUU Penyiaran. Data, informasi, dan masukan tersebut akan kami gunakan sebagai bahan acuan dan kajian Panja Komisi I DPR RI dalam perumusan RUU Penyiaran. Untuk itu, tema kunjungan kerja yang kami lakukan pada kesempatan ini fokus pada Pengembangan

Konten Siaran Lokal Dalam Era Penyiaran Digital,” kata Bambang dalam sambutannya di Kantor TVRI Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/6).

Bambang mengapresiasi TVRI Jateng yang memiliki program-program acara menarik bernuansakan konten kearifan lokal. Dalam hal ini, TVRI Jateng melakukan strategi agar program acaranya disukai masyarakat Jateng dengan pemanfaatan bahasa sebagai strategi pemasaran identitas lokal. Terdapat beberapa siaran menggunakan bahasa Jawa, di antaranya program acara berita ‘kalawarti’, menggunakan bahasa kromo inggil dan program ‘kabar panginyongan’ menggunakan bahasa ngapak. Pemikiran ini menempatkan konten lokal menjadi modal dasar dalam mengembangkan kualitas siaran TVRI Jateng.

“Bagaimana TVRI Jawa Tengah punya program-program yang sangat menarik dan saya yakin (program itu) tidak hanya akan dinikmati atau disukai oleh masyarakat Jawa Tengah saja tetapi juga masyarakat dari provinsi lain,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut lebih lanjut. ■ nvl/sf

kesiapan Binda Jateng menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut,” jelas Anton usai pertemuan, di Surakarta, Jateng, Sabtu (25/6).

Usai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh jajaran Binda Jateng, politisi Partai Demokrat ini pun menilai Binda Jateng cukup siap dan tanggap dalam menangani sejumlah isu-isu strategis nasional khususnya yang ada di Jateng. Ia pun meyakini Binda provinsi Jateng dalam hal ini mampu menciptakan suasana kondusif.

“Insya Allah aman, baik itu masalah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) ataupun masalah-masalah lainnya. Ke depan Binda Jateng akan Kami terus dorong agar jangan lengah, dan tetap waspada, terhadap isu-isu seperti radikalisme, terorisme, atau isu SARA lainnya yang

bisa merusak kebhinekaan di Republik ini,” harap Anton.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Binda Jateng sudah memiliki antisipasi yang sudah cukup baik sehingga diharapkan Jateng bisa kondusif. “Ke depan Binda Jateng ini (diharapkan) khususnya bisa menjamin pelaksanaan program strategis dan pembangunan nasional agar terlaksana dengan aman,” imbuh politisi PKS itu. ■ tra/aha

Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno.
Foto: Tiara/nvl



Komisi II Apresiasi Seluruh Masyarakat Papua Dalam Mendukung DOB

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Papua khususnya yang hadir dalam pertemuan di Jayapura mulai dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) begitu antusias menyampaikan aspirasinya serta secara prinsip tak lagi mempersoalkan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran tiga provinsi baru di Papua. Sebelumnya, dukungan serupa juga ditunjukkan masyarakat Papua yang berada di Merauke.

“Masyarakat begitu antusias menyampaikan aspirasi bahwa pemekaran provinsi di Papua nantinya harus berdampak positif bagi Orang

Asli Papua dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip adat istiadat. Tentu hal ini sangat produktif dan saya atas nama Komisi II DPR RI mengapresiasi secara penuh forum yang kita adakan secara terbuka dua hari baik di Merauke dan Jayapura hari ini,” ujar Doli usai memimpin tim kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI dalam rangka terkait RUU Tentang Pemekaran Provinsi Papua di Jayapura, Sabtu (25/6).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan adapun berkaitan dengan masih adanya permasalahan tentang pemilihan calon Ibu Kota di Papua Tengah nantinya antara Nabire dan Timika maka Komisi II mendorong segera adanya musyawarah mufakat antar *stakeholder* Nabire dengan Timika demi menghindari adanya pecah belah.

Doli mengusulkan, para Bupati yang mewakili masyarakat masing-masing itu bisa segera berunding untuk kemudian mencari kesepakatan terbaik.

“Kami serahkan serahkan dulu kepada mereka, kalau kami di DPR RI itu sebetulnya hampir tidak ada masalah artinya tidak ada perbedaan secara mencolok di anggota panja maupun fraksi-fraksi. Kami berusaha musyawarah mufakat dan itu sebenarnya demi kebaikan Papua. Jadi apapun yang dihasilkan serta direkomendasikan oleh masyarakat Papua maka pasti akan kami terima. Jadi kita mendorong penyelesaiannya secara musyawarah mufakat,” pungkas Doli.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, Syamsurizal dan Saan Mustopha lalu Anggota Komisi II dapil Papua Komarudin Watubun dan Sulaeman L. Hamzah serta Anggota Komisi II lainnya antara lain Guspari Gaus, Rezka Oktoberia, Teddy Setiadi, Riswan Tony dan Hugua. Hadir pula 29 Bupati, Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Kajati Papua, Pimpinan DPRD 29 Kabupaten/Kota, Panitia DOB Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Pegunungan Tengah. Sebelum memasuki ruang rapat, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI disambut serta diiringi tarian adat Papua secara semarak. ■ pun/aha



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat bertukar cenderamata dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Papua. Foto: Puntho/rvl

Komisi III Apresiasi Kinerja Polda-Kajati Sultra dalam Penegakan Hukum Illegal Mining

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Polda Sulawesi

Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sultra beserta jajaran, dalam menegakkan hukum di kasus-kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang menyangkut penjagaan dan penanganan terhadap sumber daya alam dan penerimaan negara. Adies mengatakan Komisi III DPR RI cukup memperhatikan perkembangan penegakan hukum di Sultra.

“Perkembangannya memang cukup baik penanganan penegakan hukum di sini, jadi hampir tidak ada ribut-ribut, tidak ada kegaduhan, dan semua bisa dikoordinasikan antar aparat penegak hukum dari atas sampai bawah. Dan

juga (dari) sumber daya alam itu, devisa masuk untuk ke negara juga cukup besar dari Sulawesi Tenggara. Jadi ya alhamdulillah sekarang (penegakan hukum) bisa berjalan dengan baik,” kata Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sultra Teguh Pristiwanto, dan Kajati Sultra Ramel Jesaja, di Mapolda Sultra, Kendari, Jumat (24/6).

Adies melanjutkan, Polda Sultra dengan segala keterbatasan personel yang dimiliki dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di kasus *illegal mining*, namun Polda Sultra masih tetap optimal dan maksimal melakukan razia-razia terhadap kegiatan *illegal mining* tersebut.

“Kemudian harus juga diperhatikan oknum-oknum dari ESDM (Energi

dan Sumber Daya Mineral) yang mempermainkan izin dan lain sebagainya itu juga perlu ditindaklanjuti. Bagaimana kinerja mereka, karena banyak laporan juga yang bermain adalah oknum-oknum dari ESDM,” tandas politisi Partai Golkar itu. ■ *ndy/sf*



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.
Foto: Nadia/nvl

Adde Rosi: Penyalahgunaan Narkotika Harus Ditangani Secara *Extraordinary*

Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengungkapkan, ketika membahas kejahatan narkotika, bukan hanya seputar penindakan. Melainkan harus terencana secara matang proses penanganannya dari hulu hingga hilir. Hal tersebut harus termaktub dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Kita tahu bahwa narkotika adalah kejahatan *extraordinary*, oleh karena itu penanganannya pun harus *extraordinary*. Bagaimana pencegahan, penindakan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan secara komprehensif

dan menyeluruh,” kata Adde Rossi usai pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Ka BNNP Jabar serta Kakanwil Kemenkumham Jabar di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (23/6).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus bahasan pada hari ini. Salah satunya adalah rehabilitasi. Menurutnya, rehabilitasi merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Ketika sudah diundangkan, Adde Rosi berharap, UU Narkotika mampu menjawab kekhawatiran masyarakat yang menganggap bahwasanya

rehabilitasi hanya berlaku kepada orang-orang yang memiliki banyak uang. Sedangkan yang tidak punya uang, harus mendekam di lapas. ■ *es*



Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. Foto: Erman/nvl

Komisi V Serap Usulan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Grobogan



Anggota Komisi V DPR RI Sudewo bertukar cenderamata dengan Bupati Grobogan. Foto: Oji/Invi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi V Sudewo melakukan pertemuan dengan Bupati Grobogan dan jajarannya dalam rangka menyerap berbagai

usulan. Serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang mobilitas masyarakat di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya, di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (24/6).

“Kita semua yakin bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja, khususnya percepatan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Padat Karya,” ungkap Sudewo.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi V DPR RI ingin mengetahui dan menginventarisir kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur di

Kondisi DAS Pangkajene Perlu Penanganan Serius

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengatakan pendangkalan Sungai Pangkajene, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengakibatkan kapal-kapal yang berasal dari kepulauan susah untuk masuk ke perairan di Kota Pangkep. Kondisi Daerah

Aliran Sungai (DAS) di Pangkajene perlu penanganan serius karena selain itu juga mengakibatkan banjir.

“Banjir besar terjadi di kabupaten Pangkep salah satu penyebabnya adalah pendangkalan sungai Pangkajene. Banjir yang cukup meluas hampir sepanjang tahun 2021 dan awal tahun 2022 kemarin,” katanya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten

Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (23/6).

Oleh karenanya, legislator dapil Sulsel II itu berharap pemerintah pusat perlu turun tangan guna menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu, kondisi Bendung Tabo-Tabo yang dibangun hampir 60 tahun belum pernah dibenahi, bahkan sampai saat ini kondisinya cukup parah sehingga ini juga akan menyebabkan banjir yang berkepanjangan di Pangkep.

“Nah manfaat yang didapatkan jika ini diperbaiki secara menyeluruh adalah tentu perekonomian masyarakat bisa terbantu, tadinya sawahnya panen hanya 1 kali setahun bisa menjadi 2 kali dalam setahun. ■ cas/aha

Kabupaten Grobogan, utamanya terkait kebutuhan infrastruktur di bidang (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) PUPR. Tak lupa dirinya juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan dari pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah serta mitra kerja Komisi V DPR RI.

“Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Grobogan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan keberpihakan dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menaikkan daya tarik terhadap para investor,” tandas legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Sudewo menjelaskan salah satu usulan dari Pemkab Grobogan adalah agar ruas jalan Semarang-Purwodadi-Blora naik kelas, dimana semula ruas tersebut merupakan jalan provinsi dan diusulkan menjadi jalan nasional. “Banyaknya kendaraan besar maupun yang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) menjadi salah satu alasan pengusulan kenaikan kelas menjadi jalan nasional. Kapasitas jalan tersebut sebagai jalan provinsi sudah tidak layak,” imbuhnya. ■ oji/aha



Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras. Foto: Chasbi/nvl

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera



Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra mengatakan percepatan pembangunan tol Trans Sumatera; Palembang, Indralaya, Muara Enim dan ruas tol Kayu Agung, Palembang, Betung dan Jambi, harus segera selesai. Demikian dikatakan Eddy usai meninjau dan dialog dengan Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, BPJT dan Waskita Sriwijaya Tol, Kamis (23/6).

“Kami melihat masih perlu adanya percepatan-percepatan, entah itu dari BPJT, pengembangan jalan tol, maupun yang diberi kewenangan badan usaha jalan tol. Baik itu Waskita Sriwijaya dan Utama Karya.” Kata Eddy. Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, pembangunan tol Trans Sumatera masih banyak menemui keluhan terutama terkait pembebasan lahan dan anggaran yang masih belum tersedia.

“Sebenarnya harusnya pembebasan lahan jadi lebih mudah. Negosiasi dan

pendekatannya lebih gampang. Saya kira ini tidak lama lagi bisa selesai. Kita mohon bantuan gubernur melalui teman-teman di lapangan agar lebih cepat, ini yang dikeluhkan teman-teman tadi kenapa tidak dipercepat *mainroad* Trans Sumatera, tol *road* dari Bakauheni ke Medan. Artinya nanti ke Jambi bisa lebih cepat, maka perlu diadakan percepatan pembangunan,” jelas Eddy lebih lanjut.

Eddy menilai dari Tol Bakauheni sampai Kayuagung dikeluhkan banyak kerusakan. “Bahkan belum diresmikan saja sudah rusak dan waktu rapat di Senayan, Pak Menteri PUPR janji pada Lebaran *kemaren* ada perbaikan sementara. Setelah itu, nanti bagus dan lebih mulus, ada perbaikan permanen. Untuk yang sekarang sedang dibangun agar juga lebih diperhatikan. Permukaan tol harus lebih rata, lebih bagus, dan lebih kuat konstruksinya,” jelas legislator dapil Sumatera Selatan I itu. ■ afr/aha

Wujudkan Kedaulatan Pangan, Sondang Tampubolon Minta BUMN atasi Kelangkaan Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur untuk dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan BUMN tersebut dalam hal ketersediaan pupuk di lapangan yang memiliki kualitas terbaik dan harga terjangkau.

“Sekali lagi kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 ini, bagaimana bisa

meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya,” tegas Sondang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Selasa (21/6).

PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra dinilai penting guna mengemban penugasan Pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional. “Oleh karena itu itu

yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu. ■ hnm/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto: Hanum/nvl

Intan Fauzi Dukung Implementasi Transformasi Industri Gula PTPN



Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi mendukung implementasi transformasi industri gula PT Perkebunan Nusantara agar segera direalisasikan untuk meningkatkan produksinya. Pasalnya, PTPN ini termasuk dalam sepuluh BUMN dengan pendapatan besar.

“Jadi transformasi PTPN menjadi *holding* BUMN gula ini memang patut kita dukung. Kalau berbicara program tiga strategis yang akan dicanangkan sebelum mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, untuk program hilirisasi dari hasil-hasil perkebunan ini perlu menjadi perhatian,” ujar Intan saat

mengikuti Kunspek Komisi VI DPR ke PTPN IX, Semarang, Rabu (22/6).

Politisi PAN ini berharap, jika Indonesia nantinya berhasil menjadi pemasok gula konsumsi terbesar, jangan sampai malah tidak bisa melakukan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.

“Apa yang sudah dipaparkan oleh Dirut PTPN tadi patut kita dukung, karena semangatnya agar *holding* gula ini bisa swasembada. Namun, saya juga mau mengingatkan, kedepan akan ada isu krisis pangan dunia, Indonesia sebagai negara yang punya SDA yang luar biasa harus bisa menjawab tantangan ini,” pungkas Intan. ■ jk/aha

Komisi VII Apresiasi Progres Pembangunan ‘Refinery Unit’ V Balikpapan



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Andri/nvl

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi progres pembangunan *Refinery Development Master Plan* (RDMP) PT.

Pertamina (Persero) dan optimalisasi kegiatan usaha gas bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proses pembangunan Refinery Unit (RU) V diketahui masih sesuai dengan jadwal tahun ini, sementara progres kilang pembangunannya mencapai 65 persen dan diharapkan nanti kilang berproduksi optimal pada tahun 2024.

“Dengan naiknya kapasitas kilang ini kita bisa mengurangi impor, hal inilah yang menjadi perhatian kami di Komisi VII DPR. Kami harapkan pembangunan RU V Balikpapan dapat tepat waktu

dan secara volume produksi nanti mencakup sekian persen dari kapasitas nasional sehingga kebutuhan akan BBM bisa di penuhi dari dalam negeri,” kata Sugeng saat meninjau Proyek RDMP PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Jumat (24/6).

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, kurang lebih kapasitas eksisting kilang ini yang sudah ada adalah 260.000 barel per hari. Rinciannya memproduksi berbagai BBM dan sejumlah turunannya termasuk juga memproduksi elpiji Likuid petroleum gas. “Dengan RDMP ini maka kapasitasnya menjadi 360.000 barel per hari dan nanti akan merupakan kilang terbesar di Indonesia setelah Cilacap,” ungkapnya. ■ man/aha

Wujudkan Penggunaan EBT, Pemerintah Perlu Dorong Industri Gunakan Panel Surya

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk mendorong sektor industri agar menggunakan panel surya sebagai energi baru dan terbarukan (EBT), seperti memberikan insentif bagi industri yang menggunakan panel surya agar industri tergerak memanfaatkan panel surya sebagai EBT. Serta untuk mempercepat pengembangan industri.

Demikian diungkapkan Eddy usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dirut PT Len Industri, Dirut PT Surya Energi

Indotama, perwakilan Pemprov Jawa Barat, perwakilan Pemkot Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6).

“Saya kira perlu adanya dorongan dari pemerintah antara lain bagaimana pemerintah mendorong bahkan memberikan insentif bagi industri yang menggunakan panel surya. Jadi itu merupakan salah satu pendorong yang bisa dijadikan fasilitator untuk mempercepat pengembangan industri,” kata politisi PAN itu.

Kendala yang dialami untuk pengembangan panel surya di Indonesia ini dinilai tidak terlalu besar. Faktor utama adalah ketersediaan bahan baku panel surya yang dirasa masih kurang dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang belum dikembangkan. “Sebetulnya TKDN masih bisa diperbesar dan ditingkatkan

lagi bahwa bahan baku untuk ke panel surya itu masih harus diimpor, sedangkan sumber bahan bakunya itu adalah pasir besi yang kita ekspor keluar,” kata Eddy. ■ ron/sf

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.
Foto: Aaron/nvl



Charles Honoris Dorong Kajian Ganja untuk Kepentingan Medis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai Indonesia harus sudah memulai kajian tentang manfaat tanaman ganja (*Cannabis sativa*) untuk kepentingan medis. Hal ini menyusul viralnya foto Pika, anak penderita *cerebral palsy*, bersama sang ibunda yang menyampaikan aspirasi butuh ganja medis untuk pengobatan, saat *car free day* (CFD) di Jakarta.

“Kajian medis yang obyektif ini akan menjadi legitimasi ilmiah, apakah



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Munchen/nvl

program ganja medis perlu dilakukan di Indonesia,” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (28/6).

Charles mengatakan, pada akhir 2020 Komisi Narkotika PBB (CND) sudah mengeluarkan ganja dan resin ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961. Artinya, ganja sudah dihapus dari daftar narkoba paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis. “Sebaliknya, keputusan PBB ini

Komisi IX Dorong Percepatan Vaksinasi Booster di Kota Bekasi

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan hampir di seluruh daerah memiliki tantangan yang sama dalam mengejar target vaksinasi, tidak terkecuali vaksinasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Putih mengungkap masih banyak daerah yang sulit mengejar capaian vaksinasi *booster*, padahal vaksinasi *booster* dinilai penting untuk melindungi



Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari. Foto: Tasya/nvl

masyarakat dari berbagai varian virus Covid-29 yang terus bermutasi.

“Saya kira masih sama ya tantangannya dengan daerah-daerah lain yaitu terkait vaksinasi *booster* yang masih rendah, dan kami mendorong agar pemerintah Kota Bekasi ini untuk bisa segera meningkatkan capaian vaksinasi *booster*-nya. Sehingga jangan sampai angka Covid ini jadi meningkat karena memang *booster*-nya rendah,” terang Putih Sari usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan perwakilan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Bekasi, BPJS Kesehatan Kota Bekasi, dan Direktur RSUD Kota Bekasi di Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/6).

Meskipun capaian vaksinasi belum maksimal, Putih tetap mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan

menjadi pendorong banyak negara untuk mengkaji kembali kebijakan negaranya tentang penggunaan tanaman ganja bagi pengobatan medis,” jelas Charles lebih lanjut.

Menurut Charles, di dunia kini terdapat lebih dari 50 negara yang telah memiliki program ganja medis, termasuk negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. “Terlepas Indonesia akan melakukan program ganja medis atau tidak nantinya, riset adalah hal yang wajib dan sangat penting dilakukan untuk kemudian menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan/penyusunan regulasi selanjutnya,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III ini.

Politisi PDI-Perjuangan ini berpandangan riset medis harus terus berkembang dan dinamis demi tujuan kemanusiaan. “Demi menyelamatkan kehidupan Pika, dan anak penderita radang otak lain, yang diyakini sang ibunda bisa diobati dengan ganja. Negara tidak boleh tinggal berpangku tangan melihat ‘Pika-Pika’ lain yang menunggu pemenuhan hak atas kesehatannya,” ujarnya. ■ ann/sf

oleh Pemkot Bekasi dalam mengejar capaian vaksinasi di Kota Bekasi. Di antaranya pelibatan aparat Kepolisian serta program *door to door* untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksin *booster*. Putih mengharapkan upaya yang dilakukan Pemkot dapat memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19.

“Kami mengapresiasi upaya dari Pemerintah Kota Bekasi dengan melibatkan aparat yang lain seperti Kepolisian tadi disampaikan yah, lalu *door to door* juga ke masyarakat. Hanya saja memang ini yang harus terus ditingkatkan sehingga timbul kesadaran masyarakat selain tentunya memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat tentang pentingnya *booster* vaksin ini,” ujar legislator dapil Jabar VII ini. ■ nap/aha

Komisi IX Dorong Pemkot Tangsel Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap PIE



Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat memimpin Kunspek Komisi IX ke Tangsel. Foto: Ria/rvi

Meski pandemi Corona sudah berjalan 2,5 tahun, tapi belum ada tanda-tanda pasti bahwa penularan Covid-19 akan berakhir. Belakangan ini kasus Covid-19 memang menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kasus harian 1 bulan yang lalu jauh di bawah 300 kasus. Namun per 26 Juni 2022, kasus baru harian mencapai 1700 lebih sehingga kini kasus aktif Covid-19 mencapai 14.516 kasus.

Tren peningkatan kasus Covid-19 tidak saja di Indonesia tapi juga secara global. Hal ini tidak bisa terlepas dari merebaknya varian baru Omicron BA.4 dan BA.5 Kementerian Kesehatan RI memprediksi puncak penyebaran gelombang varian Omicron BA.4 dan BA.5 akan terjadi pada akhir Juli. Komisi IX DPR RI meminta seluruh daerah mewaspadaai penyakit infeksi emerging atau PIE (flu burung, flu babi, Mers-CoV, Ebola dan lainnya).

“Kami terus mendorong adanya akselerasi langkah-langkah strategis untuk pengendalian pandemi, termasuk percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk vaksin *booster*, dan juga pengetatan kembali pelaksanaan protokol kesehatan dan peningkatan surveilans dan *testing*,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (28/6).

Selain pandemi Covid-19, lanjut Dewi, Komisi IX DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap merebaknya beberapa penyakit yang belum sepenuhnya diketahui seperti hepatitis akut dan *monkey pox* (cacar monyet). “Kami hadir guna membahas bagaimana daerah bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap Penyakit Infeksi Emerging (PIE), termasuk bagaimana sistem *early detection* dan surveilans dijalankan dengan dukungan anggaran yang cukup,” tandas politisi Partai Golkar itu lebih lanjut. ■ rnm/sf

Telaah Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau, BAKN DPR Kunjungi IPB University



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI. Foto: Geraldi/nvl

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan kunjungan BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB) University dalam rangka ingin mendapat masukan dari akademisi terkait pengelolaan cukai hasil tembakau. Permasalahan cukai hasil tembakau selama ini berkaitan dengan perizinan, tarif cukai, serta laporan produksi, pelunasan, pelekatan, pengembalian, dan pemusnahan pita cukai.

Di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke IPB University, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6), Wahyu mengatakan, penelaahan cukai hasil tembakau dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait cukai yang diperoleh dari tembakau pada tahun 2016, 2019, dan 2020.

“BAKN DPR RI perlu mendengar masukan para pakar IPB University untuk perbaikan kebijakan, dan langkah-langkah yang mesti dilakukan (terkait cukai hasil tembakau). Kami menganggap bahwa masukan IPB University menjadi salah satu rujukan utama kami bagi permasalahan cukai hasil tembakau. IPB University merupakan salah satu *center of*



PERMASALAHAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SELAMA INI BERKAITAN DENGAN PERIZINAN, TARIF CUKAI, SERTA LAPORAN PRODUKSI, PELUNASAN, PELEKATAN, PENGEMBALIAN, DAN PEMUSNAHAN PITA CUKAI.

excellence untuk riset seputar pertanian khususnya tembakau,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Sementara Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, dengan kunjungan ini, diharapkan mendapatkan kajian dari IPB mengenai permasalahan hasil cukai tembakau sehingga pendapatan negara menjadi

lebih baik, dan kesejahteraan petani tembakau juga meningkat. “Permasalahan tembakau berbahaya bagi kesehatan, kami sangat yakin dengan meningkatnya tingkat pendidikan di Indonesia, maka konsumsi tembakau untuk rokok akan menurun dengan sendirinya,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu, Rektor IPB University Prof. Arif Satria mengatakan tembakau merupakan salah satu komoditas yang memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan negara. Tetapi petani-petani tembakau belum mendapatkan kesejahteraan yang semestinya dari sumbangan komoditas tembakau. “Selain itu, temuan dan inovasi IPB membuktikan bahwa pengembangan komoditas tembakau bisa diarahkan ke produk-produk selain rokok. Tembakau dapat diolah menjadi sabun, parfum, pestisida, produk kosmetik, hingga biodiesel/bioenergy,” ucap Arif. ■ *opi/sf*

DPR Akan Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Asean Terkait Narkotika

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Dewan Penasehat Parlemen ASEAN terkait narkotika dan obat-obatan terlarang pada tahun 2023 mendatang. Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan pertemuan parlemen negara-negara ASEAN ini akan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan menuju ASEAN Drug Free.

“Tahun depan Indonesia dipercaya jadi tuan rumah AIPACODD (AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs). Tentunya kita ingin sekali memperkuat hubungan ASEAN dalam memberantas narkotika karena sebagai satu kawasan memerangi narkotika tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri,” ungkap Irine usai mengikuti serah terima tuan rumah AIPACODD dari Parlemen Kamboja yang dilaksanakan secara daring, Jumat (24/6).

Serah terima tersebut dilaksanakan di sela-sela pertemuan ‘5th Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous of Drugs dengan tema *Addressing Challenges Together for a Drug - Free ASEAN*. Pertemuan yang digelar tatap muka secara virtual ini dihadiri perwakilan parlemen dari sejumlah negara ASEAN, di antaranya Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapore, Brunei, Filipina, Myanmar, Laos dan Kamboja selaku tuan rumah.

Dalam upaya pemberantasan narkotika, Irine berpandangan peran organisasi regional ASEAN sangat penting dalam menghentikan produksi, peredaran, penyelundupan serta penyalahgunaan Narkotika di kawasan. Menurut Anggota Komisi I DPR RI tersebut, DPR akan terus menjalin kerja sama dengan

parlemen negara-negara ASEAN dalam memerangi narkotika. Apalagi, penyalahgunaan narkotika merupakan *extraordinary crime* dan merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia.

“Kita negara-negara di ASEAN harus satu visi menjalankan misi yang sama yaitu pemberantasan narkotika. Bagaimana kita membentengi diri secara kawasan, ini menjadi utama dan beberapa resolusi dibuat sangat penting bagi kita sesama negara ASEAN untuk mendapatkan satu perspektif yang sama terkait dengan narkotika itu sendiri,” imbuh politisi PDI-Perjuangan tersebut. ■ ann/sf

Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.
Foto: Anne/nvl



Bangun Kolaborasi Intensif, BK DPR Tandatangani MoU dengan Institusi Keagamaan di Palangkaraya

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sejumlah institusi keagamaan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah guna membangun kolaborasi yang lebih intensif dalam berbagai hal. Institusi Keagamaan tersebut yakni Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangkaraya, Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP), dan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis (STT GKE).

“Kerja sama ini dimaksudkan untuk membangun kolaborasi dan memperluas jaringan DPR, khususnya

Badan Keahlian, dalam rangka peningkatan partisipasi publik. Mengingat tuntutan akan rumusan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat semakin kuat,” jelas Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul, usai penandatanganan MoU di Kampus IAKN, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (26/6).

Sensi, sapaan akrabnya berharap, dengan adanya penambahan tiga kolaborasi bersama perguruan tinggi di Palangkaraya yang dilakukan melalui penandatanganan MoU ini, maka ruang pelibatan partisipasi publik bagi BK untuk melakukan penyusunan naskah akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), maupun naskah kebijakan lain di

DPR bisa ditambah. Hal tersebut, ditegaskan Sensi, menjadi hal penting dari terlaksananya agenda penandatanganan MoU yang telah dilakukan BK DPR RI.

“Di samping memperluas jaringan, tentunya lebih detail lagi, kebutuhan untuk penelitian, misal terhadap RUU, kami juga mencari pakar-pakar yang ahli di bidangnya dan tidak hanya dari sekitar wilayah DKI Jakarta saja, namun hingga ke Kalimantan, sehingga nanti masukan-masukan bisa lebih bervariasi,” ujar Sensi.

Selain itu, Sensi juga menyoroti Kalimantan merupakan wilayah yang strategis, terlebih lagi lokasi Palangka Raya nantinya akan dekat dengan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur. “Pakar-pakar di sini juga mulai mempersiapkan diri dan merespon berbagai dinamika dan pemikiran yang ada di pusat-pusat pemerintahan, salah satunya terkait IKN. Sehingga pakar dan akademisi di Kalimantan ini juga berpotensi dapat memperluas kajian BK DPR RI melalui berbagai pemikiran dan juga masukan,” ucap Sensi.

Dengan adanya MoU ini, Sensi memaparkan bahwa dalam penyusunan naskah akademik, BK DPR akan melakukan kerja sama di berbagai sektor, tidak hanya RUU saja, tapi juga hingga naskah akademik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kajian-kajian yang dihasilkan lebih berkualitas. ■ ica/sf



Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul berfoto bersama usai penandatanganan MoU di IAKN. Foto: Ica/mvf

BURT DPR Tinjau Kesiapan Pelaksanaan Jamkestama di RS Surya Husadha Denpasar



Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah bertukar cenderamata usai pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan manajemen Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar. Foto: Rizki/inv

Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah meninjau Rumah Sakit Surya Husadha di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam rangka meninjau kesiapan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya yang dijalankan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

“Kunjungan kerja pada hari ini adalah di Rumah Sakit Surya Husadha, kita mau mengecek di ibu kota Provinsi Bali bagaimana penanganan kesehatan terutama bagi pasien-pasien Jamkestama yang sedang ada keluhan kesehatan di Bali,” papar Dimiyati usai pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI

dengan manajemen Rumah Sakit Surya Husadha dan direksi PT Jasindo, di Denpasar, Bali, Rabu (29/6).

Dimiyati mengapresiasi fasilitas di RS Surya Husadha dan merekomendasikan RS tersebut sebagai rujukan bagi pasien Jamkestama yaitu Anggota DPR dan keluarganya setelah ia melihat kesiapan fasilitas dan ketersediaan layanan dokter spesialis bagi penyakit tertentu. “Rumah Sakit Surya Husadha saya rekomendasikan pada semua pasien Jamkestama beserta keluarganya untuk berobat ke rumah sakit ini karena sudah layak dan dokter-dokternya juga mumpuni dalam penanganan kesehatan terutama yang spesialisasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, BURT DPR RI sempat menyoroti layanan penanganan

Covid-19 dan non Covid-19 yang dilakukan RS Surya Husadha. Usai melihat langsung ke lapangan, Dimiyati menyatakan bahwa RS Surya Husadha sudah memisahkan dan memberi pelayanan dengan sangat baik. “Ternyata sudah ada pemisahan termasuk di tempat *emergency* khususnya di ICU dan IGD yang sifatnya Gawat Darurat dan saya rasa rumah sakit ini sudah oke lah dalam memberikan layanan kesehatan

di Bali,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Terkait pelaksanaan program Jamkestama yang dilakukan PT Jasindo, dalam kunjungan tersebut BURT DPR RI masih menyoroti kelengkapan data peserta, khususnya Anggota DPR RI, dan masalah layanan yang kerap kali masih menyulitkan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jasindo Andy Samuel menyampaikan akan segera melakukan perbaikan. Dirinya juga berharap hal tersebut dapat disampaikan pada evaluasi kerja bersama BURT DPR RI selanjutnya. “Kiranya nanti pada evaluasi kinerja dengan BURT DPR yang berikutnya sudah terdapat perbaikan-perbaikan kedepannya yang bisa kami laporkan kepada para pimpinan,” pungkas Andy kepada BURT DPR RI. ■ rr/sf



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN :

*Selamat Hari Raya
Idul Adha 1443 H*

